



Electronic Implementation of Government Agency Performance Accountability System (e-SAKIP) of Regional Device Organization in Bengkulu Provincial Government (Case Study of Efforts to Overcome Delays in Reporting Performance of Regional Development Planning Research & Innovation Agency of Bengkulu Province)

Implementasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu (Studi Kasus Upaya Mengatasi Keterlambatan Pelaporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset & Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu)



Cendy Sartika Dewi^a
Evsya Wulan Suri^b
Edi Darmawi^c

Article history:

Submitted: 02-11-2025

Revised: 03-12-2025

Accepted: 29-12-2025

Keywords:

Bureaucratic Reform, Human Resources, Good Governance, Competence.

Abstract

Bureaucratic reform is a strategic step to realize good governance, increase capacity, accountability, and the quality of public services. This study aims to analyze the implementation of bureaucratic reform at the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB) of Bengkulu City in four main aspects: institutions, governance, human resources (HR), and accountability and performance, while also assessing its impact on the quality of public services. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation. Informants in this study consisted of leaders, structural officials, employees within the DP3AP2KB of Bengkulu City, and service users. The data analysis technique used is an interactive model that includes data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The theoretical basis of this study is based on Samuel P. Huntington's Modernization and Reform Theory which emphasizes the importance of gradual institutional change. The results of the study indicate that the

^a Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

^b Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

^c Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu



implementation of bureaucratic reform at the DP3AP2KB of Bengkulu City has been running quite well but still faces several obstacles. From an institutional perspective, the establishment of the UPT P2TP2A (Integrated Service Unit for Victims of Violence) has successfully integrated service functions for victims of violence, making things easier for the public. In terms of governance, cost transparency is considered excellent, as all services are free of charge without any illegal fees. However, in terms of human resources and technology utilization, implementation gaps remain, including limited personnel, slow responses to online complaints (e.g., WhatsApp), the lack of a 24-hour on-call service, and bureaucratic obstacles resulting from the centralization of authority in signing referral letters. Overall, bureaucratic reform has had a positive impact on more integrated case management, although optimizing responsive public services remains hampered by budget and human resource limitations.

Keywords: *E-Government, Accountability, Reporting, Technology Acceptance Model (TAM).*

Abstrak

Implementasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, keterlambatan pelaporan kinerja masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses monitoring dan evaluasi kinerja serta memengaruhi kualitas pengambilan keputusan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-SAKIP dalam mengatasi keterlambatan pelaporan kinerja OPD di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat dalam pengelolaan e-SAKIP, meliputi pimpinan, operator sistem, pengelola laporan kinerja, dan tim manajemen kinerja. Analisis data mengacu pada Technology Acceptance Model (TAM) dengan fokus pada dimensi *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* untuk memahami tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem e-SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-SAKIP memberikan manfaat dalam mempercepat proses pelaporan, meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja, memudahkan monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan akurasi dan keterpaduan data kinerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi implementasi e-SAKIP, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kedisiplinan pelaporan, kendala teknis sistem, serta koordinasi antarunit kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengguna, penguatan dukungan organisasi, dan optimalisasi pengelolaan sistem guna mendukung ketepatan waktu pelaporan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci : E-Government, Akuntabilitas, Pelaporan, Technology Acceptance Model (TAM).

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2025.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Cendy Sartika Dewi*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email address: cendysartika.dewi@gmail.com

1. Pendahuluan

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan kinerja yang memuat informasi mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (Lestari et al., 2022).

Pentingnya akuntabilitas kinerja kemudian diperkuat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 dari Peraturan Presiden tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2014).

Untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja, pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini digunakan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Hal ini tercermin dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada pasal 1 ayat (7) ditegaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang selanjutnya disebut SPBE. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan SAKIP juga mengalami perubahan melalui penerapan sistem berbasis elektronik yang dikenal sebagai Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) (Kerja et al., 2024).

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menerapkan E-SAKIP sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Melalui sistem ini, proses penginputan data, pemantauan capaian kinerja, hingga penyusunan laporan kinerja dapat dilakukan secara elektronik. Kehadiran E-SAKIP diharapkan mampu meningkatkan ketepatan waktu pelaporan sekaligus mempermudah proses monitoring dan evaluasi kinerja OPD (Hasman & Supriaddin, 2023). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa OPD yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan kinerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem belum sepenuhnya berjalan optimal. Keterlambatan pelaporan dapat berdampak pada proses evaluasi kinerja organisasi serta memengaruhi kualitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah (Lestari et al., 2022).

Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama terkait bagaimana implementasi E-SAKIP digunakan dalam mengatasi keterlambatan pelaporan kinerja. Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai pisau analisis untuk melihat penerimaan pengguna terhadap sistem berdasarkan persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Dengan memahami kedua aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi E-SAKIP di Pemerintah Provinsi Bengkulu (Febiani et al., 2016). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-SAKIP dalam mengatasi keterlambatan pelaporan kinerja organisasi perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui perspektif Technology Acceptance Model (TAM).



2. Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui SAKIP, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyusun dan melaporkan capaian kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan (*No Title*, n.d.-a).

Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah mengembangkan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) sebagai sarana digital dalam mendukung pelaksanaan SAKIP. e-SAKIP merupakan aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan data kinerja secara terintegrasi mulai dari penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran capaian, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja. Pemanfaatan sistem elektronik ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat penyampaian laporan, serta memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi (Reformasi & Republik, 2021).

Pelaporan kinerja merupakan bagian penting dalam pelaksanaan SAKIP karena berfungsi sebagai media penyampaian informasi mengenai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Kualitas pelaporan kinerja tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan data yang disajikan, tetapi juga oleh ketepatan waktu penyampaiannya. Keterlambatan pelaporan dapat menghambat proses evaluasi kinerja serta mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan oleh pimpinan organisasi (Mahsun et al., n.d.).

Untuk memahami penerimaan pengguna terhadap e-SAKIP, penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Model ini menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. *Perceived usefulness* mengacu pada tingkat keyakinan pengguna bahwa penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya, sedangkan *perceived ease of use* menunjukkan tingkat keyakinan bahwa sistem tersebut mudah dipahami dan digunakan. Semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan yang dirasakan pengguna, maka semakin besar pula kemungkinan teknologi tersebut diterima dan dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan pekerjaan (Diskripsi et al., 2012).

Dalam konteks implementasi e-SAKIP, kedua konstruk tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem mampu membantu OPD dalam mempercepat proses pelaporan kinerja, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, serta mengurangi potensi keterlambatan pelaporan yang selama ini sering terjadi (Wardhana & Tauran, 2025).

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi e-SAKIP telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. Penelitian (Adi Abdul Rozaq et al., 2025) lebih menekankan pada pengembangan aplikasi e-SAKIP berbasis website. Penelitian (Wardhana & Tauran, 2025) mengkaji implementasi kebijakan SAKIP melalui aspek sumber daya, komunikasi, dan disposisi pelaksana. Sementara itu, penelitian (Fifi Afifah et al., 2021) berfokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi melalui pendekatan manajerial. Penelitian (Ni Kadek Yuni Gitasih et al., 2023) menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh e-SAKIP terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Rachmad dan Priambodo membahas kontribusi e-SAKIP terhadap peningkatan akuntabilitas organisasi perangkat daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada implementasi e-SAKIP dalam mengatasi keterlambatan pelaporan kinerja dengan menggunakan perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM). Selain itu, penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan studi kasus di Bapperida Provinsi Bengkulu

Kerangka Berpikir

Pelaporan kinerja merupakan bagian penting dalam implementasi SAKIP. Namun dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan pelaporan pada beberapa OPD. Untuk mendukung pengelolaan kinerja dan mempercepat proses pelaporan, Pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan e-SAKIP sebagai sistem pengelolaan kinerja berbasis elektronik (Wardhana & Tauran, 2025).

Implementasi e-SAKIP dianalisis menggunakan *Technology Acceptance Model* melalui dua dimensi utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Semakin tinggi manfaat dan kemudahan yang dirasakan pengguna,

maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan terhadap sistem. Penerimaan tersebut diharapkan mampu mendukung ketepatan waktu pelaporan kinerja dan mengurangi keterlambatan pelaporan pada OPD .

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian berada di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu yang berperan dalam pelaksanaan dan pengelolaan e-SAKIP. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pengelolaan e-SAKIP, seperti perencana, operator sistem, penelaah teknis kebijakan, dan pengelola kinerja. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada dua dimensi *Technology Acceptance Model*, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*, serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan pelaporan kinerja.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Implementasi e-SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu

Implementasi e-SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Bengkulu dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaporan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan e-SAKIP telah diterapkan dalam berbagai tahapan pengelolaan kinerja, mulai dari penginputan data pegawai, penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan capaian kinerja secara berkala, hingga evaluasi kinerja. Sistem ini menjadi sarana yang mengintegrasikan proses pengelolaan data kinerja sehingga memudahkan OPD dalam menyusun laporan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah (*No Title*, n.d.-b).

Keberadaan e-SAKIP memberikan perubahan pada mekanisme pelaporan yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi berbasis elektronik. Dengan sistem yang terintegrasi, data kinerja dapat disimpan, diperbarui, dan diakses secara lebih mudah sehingga proses pelaporan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Analisis Implementasi e-SAKIP Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM)

Berdasarkan perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), implementasi e-SAKIP pada Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa pengguna memiliki persepsi positif terhadap sistem yang digunakan. Dari aspek *perceived usefulness*, pengguna menilai bahwa e-SAKIP mampu membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, meningkatkan produktivitas, mempermudah proses penyusunan laporan kinerja, serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Fitur yang tersedia dalam sistem memungkinkan pengguna mengelola data secara lebih terorganisir dan mengurangi potensi kesalahan yang sering terjadi pada proses pelaporan manual (Arie Pradana et al., 2025).

Selain memberikan manfaat, e-SAKIP juga dinilai mudah digunakan oleh sebagian besar pengguna. Dari aspek *perceived ease of use*, sistem dianggap memiliki tampilan dan alur penggunaan yang cukup mudah dipahami sehingga pengguna dapat menjalankan berbagai proses pelaporan tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Kemudahan dalam mengakses data, melakukan pembaruan informasi, serta menghasilkan laporan menjadi faktor yang mendukung penerimaan sistem oleh pengguna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan yang dimiliki pengguna berkontribusi terhadap penerimaan e-SAKIP dalam lingkungan kerja OPD. Temuan ini sejalan dengan konsep TAM



yang menjelaskan bahwa teknologi akan lebih mudah diterima ketika pengguna merasakan manfaat nyata dan kemudahan dalam penggunaannya.

Peran e-SAKIP dalam Mengatasi Keterlambatan Pelaporan Kinerja

Implementasi e-SAKIP berkontribusi dalam mengurangi potensi keterlambatan pelaporan kinerja melalui sistem pelaporan yang lebih terstruktur, tersedianya batas waktu pelaporan yang jelas, serta kemudahan monitoring terhadap capaian kinerja masing-masing OPD. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memantau progres pelaporan secara lebih efektif sehingga proses penyusunan laporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan belum sepenuhnya dapat dihilangkan hanya melalui penerapan e-SAKIP. Masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan, seperti kesiapan sumber daya manusia, kedisiplinan dalam penginputan data, koordinasi antarbagian, kelengkapan data pendukung, serta kendala teknis berupa gangguan jaringan atau pemeliharaan sistem. Oleh karena itu, keberhasilan e-SAKIP dalam mengatasi keterlambatan pelaporan tidak hanya bergantung pada kualitas sistem, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-SAKIP di Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan pelaporan kinerja OPD. Berdasarkan perspektif TAM, penerimaan pengguna terhadap sistem dipengaruhi oleh persepsi bahwa e-SAKIP bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pekerjaan dan mudah digunakan dalam aktivitas pelaporan sehari-hari. Kondisi tersebut mendorong pengguna untuk memanfaatkan sistem secara berkelanjutan dalam pengelolaan data kinerja. Selain itu, penerapan e-SAKIP terbukti mampu mendukung upaya pengurangan keterlambatan pelaporan melalui mekanisme kerja yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Namun demikian, faktor nonteknis masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pelaporan yang sepenuhnya tepat waktu. Dengan demikian, optimalisasi implementasi e-SAKIP perlu didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarunit kerja, serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi agar manfaat sistem dapat dirasakan secara maksimal.

5. Penutup

Kesimpulan

Implementasi e-SAKIP di Bapperida Provinsi Bengkulu telah berjalan dan digunakan dalam proses pengelolaan akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan hingga pelaporan kinerja. Berdasarkan perspektif Technology Acceptance Model, pengguna menilai bahwa sistem memiliki manfaat yang signifikan dalam mempercepat pekerjaan, meningkatkan efektivitas pelaporan, serta mempermudah pengelolaan data kinerja.

Dari sisi kemudahan penggunaan, e-SAKIP dinilai cukup mudah dipelajari dan dioperasikan oleh pengguna. Namun demikian, keterlambatan pelaporan kinerja masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompetensi sumber daya manusia, disiplin pelaporan, koordinasi antar-OPD, dan kendala teknis yang terjadi selama proses pelaporan.

Saran

Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan penggunaan e-SAKIP. Selain itu, penguatan koordinasi antar-OPD dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi perlu dilakukan agar implementasi e-SAKIP dapat berjalan lebih optimal dan mendukung ketepatan waktu pelaporan kinerja

6. Daftar pustaka

- Adi Abdul Rozaq, Lahan Adi Purwanto, Dimara Kusuma Hakim, & Supriyono. (2025). Implementasi Aplikasi e-SAKIP Berbasis Website Dalam Pengelolaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Pengabdian Teknik Dan Sains (JPTS)*, 5(2), 69–81. <https://doi.org/10.30595/jpts.v5i2.27725>
- Arie Pradana, H., Aizi Bin Selamat, M., Author, C., & name, A. (2025). Analysis of Public Acceptance of E-Government Services Using the TAM Model (Technology Acceptance Model). *Majority Science Journal (MSJ)*, 3(4), 105–115.
- Diskripsi, Pengertian, T., & Pembelajaran, S. (2012). Kajian Pustaka *أَوْ أَوْلِيَّيْبُ وَعُجَّاسُنُ دَاوُجُ أَيِّ نَسِظُو مَا لَيْبُمُ اُنْخَهَ حَلَا بِنَا لِمِكْرَ لَيْسِنَا لَكَّةَ هَيْتَا لَنْبُ*. *Molucca Medica*, 11(April), 38.
- Febiani, I., Irianto, G., & Purwanti, L. (2016). *PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS (SAKIP)*. 6(1), 831–848.
- Hasman, E., & Supriaddin, N. (2023). *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Bombana*. 4(2), 385–392.
- Kerja, T., Daerah, P., Tahun, N., Organisasi, S., & Tata, S. (2024). *Propinsi Bengkulu (I £ mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan*.
- Lestari, S., Salomo, R. V., Indonesia, U., Kinerja, A., & Pemerintah, K. (2022). *IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA* : 8(November), 798–808.
- Mahsun, M., Si, M., Sulistiyowati, F., Si, M., & Purwanugraha, H. A. (n.d.). *Oleh* :
- Ni Kadek Yuni Gitasih, I Made Sumada, & I Wayan Astawa. (2023). Pengaruh E-Sakip Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6, 1057–1064.
- No Title*. (n.d.-a). 1–4.
- No Title*. (n.d.-b).
- Npm, F. A., Studi, P., Administrasi, I., Diajukan, N., Salah, M., Syarat, S., Menyelesaikan, D., Sarjana, P., Sebelas, S., Sumedang, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2021). *Fifi Afifah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Republik Indonesia*, 2504, 1–9.



Reformasi, D. A. N., & Republik, B. (2021). *BERITA NEGARA*. 1569.

Wardhana, M., & Tauran. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 2 N(May), 61–73.